

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERETASAN
(HACKING) BERKAITAN DENGAN PENCURIAN DATA**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Gelar Magister Ilmu Hukum di Fakultas
Hukum Universitas Andalas*



OLEH :

TRI ANDIKA HIDAYATULLAH

NIM : 2120113023

DOSEN PEMBIMBING

- 1. Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H.**
- 2. Dr. Nani Mulyati, S.H, MCL.**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2023**

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERETASAN (*HACKING*) BERKAITAN DENGAN PENCURIAN DATA

(Tri Andika Hidaytullah, 2120113023, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Halaman 123, Universitas Andalas, 2023)

ABSTRAK

Hacking merupakan salah satu kegiatan yang bersifat negatif. Tetapi dalam perkembangannya *Hacking* digunakan untuk keperluan-keperluan lain yang bersifat merugikan. Perlindungan hukum dari tindak pidana *Cybercrime Hacking* ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Adapun Rumusan Masalah (1) Bagaimana Tindakan Hukum oleh Penegak hukum tentang pemberantasan tindak pidana (*Hacking*) yang berkaitan dengan pencurian data? (2) Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Peretasan (*Hacking*) yang berkaitan dengan pencurian data (3) Kendala-kendala apakah yang ditemui oleh Penegak Hukum dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Peretasan (*Hacking*) yang berkaitan dengan pencurian data? Jenis penelitian adalah Penelitian hukum normatif ditunjang dengan wawancara. Sumber data meliputi data Primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah studi dokumen dan wawancara. Data dianalisis deskriptif-analitis. Kesimpulan hasil penelitian adalah: (1) Tindakan hukum oleh Penegak hukum tentang pemberantasan tindak pidana (*Hacking*) yang berkaitan dengan pencurian data, penegakan hukum terhadap peretasan atau *hacking* masih belum mencerminkan penegakan hukum yang efektif dikarenakan kurangnya pemahaman penyidik. (2) Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana peretasan (*Hacking*) yang berkaitan dengan pencurian data, perlindungan hukum dibagi 2 (dua) macam perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. (3) Kendala-kendala yang ditemui oleh penegak hukum dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana peretasan (*Hacking*) yang berkaitan dengan pencurian data, terdiri dari beberapa aspek yaitu: aspek penyidik, aspek alat bukti dalam proses penyidikan, aspek fasilitas, aspek yurisdiksi dan hambatan yang terdapat dalam mewujudkan penegakan hukum terhadap peretasan menjadi tidak ideal karena terdapat kurangnya sarana dan fasilitas yang memadai.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Korban, Tindak Pidana, Peretasan (*Hacking*), Pencurian Data

LEGAL PROTECTION OF VICTIMS OF CRIMINAL ACTS OF HACKING RELATED TO DATA THEFT

(Tri Andika Hidaytullah, 2120113023, Master of Law Studies Program, Faculty of Law, 123 Pages, University Andalas, 2023)

ABSTRACT

Hacking is one of the activities that is negative, The legal protection of the criminal act of Cybercrime Hacking is regulated in Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, Law of the Republic of Indonesia Number 27 of 2022 concerning Protection of Personal Data. The Problem Formulation (1) How is legal action by law enforcement on the eradication of criminal acts (Hacking) related to data theft? (2) How is Legal Protection for Victims of Hacking Crimes related to data theft (3) What obstacles are encountered by Law Enforcement in Legal Protection for Victims of Hacking Crimes related to data theft? The type of research is normative legal research supported by interviews. Data sources include Primary data and secondary data. Data collection techniques are interviews and document studies. The data is analyzed descriptive-analytically. The conclusions of this research are: (1) legal action by law enforcers regarding the eradication of criminal acts (Hacking) related to data theft Law enforcement against hacking or hacking still does not reflect effective law enforcement due to the lack of understanding of investigators. (2) Legal Protection for Victims of Hacking Crimes related to data theft, legal protection is divided into 2 types of Preventive Legal Protection and Repressive Legal Protection. (3) The obstacles encountered by Law Enforcement in the Legal Protection of Victims of Hacking Crimes related to data theft, consist of several aspects: Aspects of investigators, aspects of evidence in the investigation process, aspects of facilities, aspects of jurisdiction and obstacles contained in realizing law enforcement against cybercrimes are not ideal because there is a lack of adequate facilities and facilities.

Keywords: *Legal Protection, Victims, Crime, Hacking, Data Theft*